

**STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN DAHLAN
HASAN DAN MUHAMMAD JA'FAR SUKHAIRI NASUTION
SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD SUKRI
14.851.0009



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

Strategi Partai Gerindra Dalam Memenangkan
Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far
Sukhairi Nasution Sebagai Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mandailing Natal

Nama

Muhammad Sukri

NPM

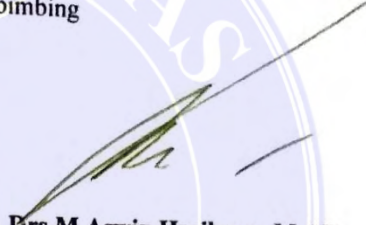
14.851.0098

Program Studi

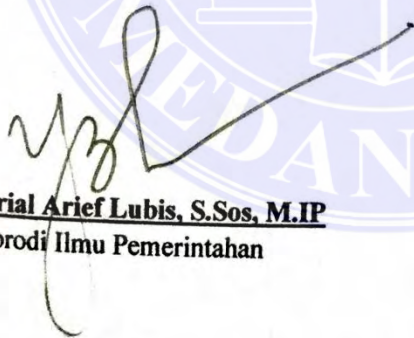
Ilmu Pemerintahan

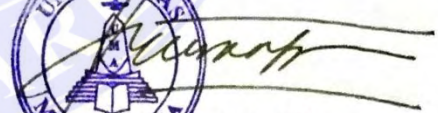
Disetujui Oleh,
Komisi Pembimbing


Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I


Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP
Pembimbing II

Mengetahui,


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Kaprodik Ilmu Pemerintahan



Dr. Heri Kasmanto, MA
Dekan FISIP UMA

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

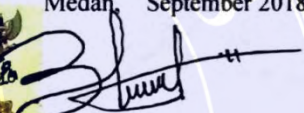
Nama : Muhammad Sukri

Npm : 14.851.0009

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN DAHLAN HASAN DAN MUHAMMAD JA'FAR SUKHAIRI NASUTION SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kedalam perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi.



Medan, September 2018


Muhammad Sukri
14.851.0009

ABSTRAK

Dalam Proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam pemilihan kepala daerah partai politik merupakan suatu kendraan politik bagi setiap orang yang ingin menduduki jabatan strategis di setiap pemerintahan. Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, oleh karena itu Pilkada harus diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya tanpa mengeluarkan ujaran kebencian serta menimbulkan konflik terhadap masyarakat demi mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu strategi sangat dibutuhkan dalam memenangkan suatu kontestasi politik. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana strategi Partai Gerindra dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal serta hambatan yang dialami waktu melakukan kampanye. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Henry Mintzberg, James Brian yang meliputi, strategi sebagai plan, ploy, pattern, position, perspective. Dari hasil penelitian berkat kerjasama partai Gerindra, tim sukses, konsultan, dan partai pengusung lainnya telah berhasil memenangkan calon yang diusung. melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, akademisi, kepala desa, ormas serta berkunjung setiap ada keramaian di masyarakat adalah poin utama yang dilakukan. dengan tersistemnya kampanye tersebut membuat masyarakat yakin bahwa pasangan tersebut merupakan pasangan yang layak dipilih untuk menjadi pemimpin di daerahnya sehingga pasangan tersebut mampu memperoleh 56,67% suara.

Kata Kunci : Strategi, Kemenangan, Partai Politik

Abstract

In the democratic process in Indonesia, especially in political party regional head elections is a political vehicle for everyone who wants to occupy strategic positions in each government. Pilkada is a means to realize the sovereignty of the people in government, therefore Pilkada must be held in a quality manner with the broadest participation of the people without issuing hate speech and causing conflict against society in order to gain power. Therefore a strategy is needed in winning a political contestation. The purpose of the study was to find out how the Gerindra Party's strategy in winning Dahlan Hasan Nasution & Ja'far Sukhairi Nasution as the Regent and Deputy Regent of Mandailing Natal District as well as the obstacles experienced during the campaign. The type of research used in this study is a qualitative research method. And the theory used in this research is Henry Mintzberg's theory, James Brian which includes, strategies as plan, ploy, pattern, position, perspective. From the results of the study thanks to the cooperation of the Gerindra party, the success team, consultants, and other bearer parties have succeeded in winning the nominated candidates. approaching community leaders, academics, village heads, mass organizations and visiting every time there is a crowd in the community are the main points that are carried out. with the systemic campaign, the community is convinced that the couple is a worthy partner to be chosen to be the leader in their area so that the pair is able to obtain 56.67% of the votes.

Keywords : strategy, victory, political Parties

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Strategi Partai Gerindra Dalam Memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis terimakasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. kedua orang tua tercinta, Ayahanda Junid dan Ibunda Asminah yang telah memberikan semangat dan doa yang tidak pernah henti untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis dimasa depan.
2. Saudara kandung penulis, Siti Khodijah, Siti Sopiah, Abdul Rosit, Halimatussakdiyah, Ahmad Rusdi yang selalu memberikan memotivasi dan mendoakan studi penulis hingga skripsi ini.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MAselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masito, S.Sos, M.AP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

6. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos.M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Bapak Drs.H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP selaku Mantan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Bapak, Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I Skripsi.
9. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP selaku pembimbing II Skripsi.
10. Ibu Evi Yunita Kurniawani, S.Sos, M.IP selaku Sekretaris Skripsi.
11. Serta Dosen-Dosen Staff pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
12. Keluarga Besar IKAMITA FISIP UMA sebagai cikal bakal Penulis dalam berproses dilingkungan organisasi.
13. Keluarga besar HMI KOMS UMA sebagai wadah yang mempertemukan penulis dengan kaum – kaum berfikir kritis dan intelektual,
14. Seluruh teman – teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Nizar Nazlia, Agustinus Pandiangan, Fan Gema S.Gea, M.Arief Rusyidi, Nia Azhari serta kawan – kawan lainnya yang telah banyak memberikan waktu dalam bertukar pikiran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 3

1.3. Tujuan Penelitian..... 4

1.4. Manfaat Penelitian..... 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8

2.1. Pengertian Strategi..... 8

2.2. Pengertian Kampanye..... 9

2.2.1. evaluasi Kampanye..... 10

2.3. Partai politik..... 11

2.3.1. Pengertian Partai Politik..... 11

2.3.2. Syarat Pembentukan, Tujuan, Fungsi, dan Kewajiban Partai Politik..... 12

2.4. Pengertian Pemilu)..... 17

2.4.1. Konsep Sistem Pemilu Proporsional..... 18

2.4.2. Konsep Sistem Pemilu Distrik..... 19

2.5. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	19
2.6. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian,Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.1. 1 JenisPenelitian	23
3.1. 2 SifatPenelitian	24
3.1. 3 LokasiPenelitian	24
3.1. 4 WaktuPenelitian	25
3.2 Informan Penelitian	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Sejarah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	30
4.1.1. Makna Lambang Partai Gerindra.....	31
4.1.2. Jati Diri Partai Gerindra.....	32
4.1.3. Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya	33
4.1.4. Tujuan Partai Gerindra.....	35
4.1.5. Fungsi Partai Gerindra	36
4.1.6. Profil Mandailing Natal.....	37
4.1.7. Jumlah Suara dan Prolehan Suara Pada Pilbub Mandailing Natal Tahun 2015	38
4.1.8. Sejarah DPC Partai Gerindra Mandailing Natal	41

4.1.9. Struktur Organisasi Dpc Partai Gerindra Kab. Mandailing Natal.....	42
4.1.10. Kewenangan dan Kewajiban DPC Partai Gerindra	43
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	45
4.2.1. Latar Belakang Kontestan	46
4.2.3. Visi Misi dan Program Calon Kontestan.....	47
4.2.4.Strategi Pemenangan Politik Dpc Partai Gerindra Mandailing Natal Pada Pilbub Tahun 2015.....	48
4.2.5. Analisis Swot.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan dan Saran.....	58
5.1.1. Kesimpulan.....	58
5.1.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Karangka pemikiran.....	22
Struktur Organisasi Dpc Partai Gerindra Kab. Madailing Natal.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*) (Hafied cangara,2014:165).

Menguatnya arus demokrasi di Indonesia pasca jatuhnya rejim orde baru oleh gerakan reformasi, berimplikasi pada mulainya restorsi berbagai aspek kehidupan bernegara, dimulai dari perbaikan atas pelembagaan politik hingga pada pengakuan dan penghormatan negara atas hak-hak individu. Pengakuan dan penghormatan atas hak sosial, politik, hukum dan ekonomi secara individu dan kelompok merupakan indikator penting bagi munculnya proses demokratisasi di Indonesia. Selain itu juga pemilihan umum merupakan salah satu indikator penting bagi tegaknya suatu konsep demokrasi pada suatu negara (Rudi Salam Sinaga, 2011:8-9).

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Kesatuan negara Republik Indonesia yang

berdasarkan pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari instrumen pemilu yang ada (Ani Rohyati, 2005:181).

Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan PILKADA serentak pada tanggal 9 Desember 2015 adalah Mandailing Natal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina telah menggelar penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perodesasi 2015-2020. Urutan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diundi oleh KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Yusuf Nasution-Imron Lubis yang diusung oleh 2 (dua) partai politik, diantaranya partai Hanura, dan PBB
2. Pasangan Dahlan Hasan Nasution - Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution yang diusung oleh 6 (enam) partai politik, diantaranya partai Nasdem, PDIP, partai Gerindra, partai Demokrat, PKB, PAN.
3. Pasangan Saparuddin Haji Lubis-Miswaruddin Daulay yang diusung oleh 2 (dua) partai politik, diantaranya partai Golkar, dan PPP.

Pemasaran sosial berorientasi pada upaya untuk memasyarakatkan ide-ide sosial terutama dalam hal dalam perilaku masyarakat untuk menerima pembaruan. Oleh sebab itu, politik yang berisi pemikiran pembaruan seperti demokrasi dan pembentukan suatu pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dapat

digolongkan sebagai produk sosial yang perlu dimasyarakatkan (disosialisasikan). Jika demikian apakah politik bisa dipasarkan untuk menarik perhatian masyarakat pemilih untuk memahami cita-cita, program pada kandidat (calon) yang diajukan.

Dalam pelaksanaan kompetisi untuk meraih jabatan publik seperti dipemilihan umum (pemilu), kampanye politik tidak selalu berjalan datar tanpa dinamika didalamnya, baik bagi kandidat maupun kompetitor lainnya. Karena ini adalah merupakan kompetisi dalam meraih jabatan publik yang didalamnya terdapat kekuasaan politik maka sebuah kemenangan adalah hal yang amat diinginkan bagi setiap kandidat yang berkompetisi. Segala usaha, dan tindakan yang telah dirancang ataupun terbentuk secara spontanitas selalu memiliki efek tertentu dalam kepentingan tercapainya misi meraih kemenangan, Rudi Salam Sinaga, 2011:31).

Mengingat akan pentingnya strategi partai dalam memenangkan calon kandidatnya, dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul :
“STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN DAHLAN HASAN NASUTION DAN MUHAMMADJA’FAR SUKHAIRINASUTION SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. ?
2. Apa saja hambatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah apa yang hendak kita capai dalam penelitian ini, berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam masa kampanye sehingga masyarakat memberikan suaranya kepada Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui hambatan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam memenangkan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

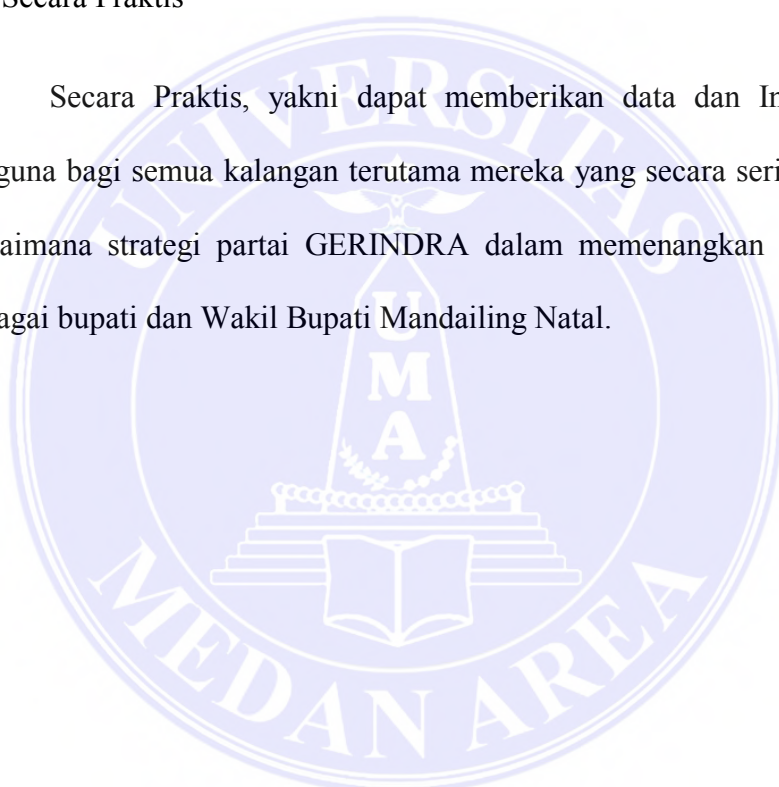
Menurut Ahmad (2015: 188) Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka saat ini yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan mengenai Strategi Partai dalam memenangkan calonnya. Pada skripsi ini peneliti berfokus pada strategi partai GERINDRA dalam memenangkan dahlan-Ihsan sebagai bupati Mandailing Natal.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, yakni dapat memberikan data dan Informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati bagaimana strategi partai GERINDRA dalam memenangkan Dahlan-Hasan sebagai bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Strategi

Pemilihan (*elections*), sering dipandang sebagai “*the heart of the political process*”. Demikian juga dari sisi lain bahwa pemilihan itu merupakan lambang, sekaligus tolak ukur dan praksis (implementasi) dari prinsip-prinsip demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. (P. Anthonius Sitepu : 2012 :173). Pemilihan umum itu sendiri (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum adalah sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Menurut Gatot Widayanto (1994) dalam buku acuan kampanye manajemen pemasaran partai politik asal mula kelahiran strategi berawal dari lingkungan militer pada sekitar 500 tahun sebelum Masehi, strategi mulai populer

dipakai para ahli militer. Para jendrala perang merencanakan strategi militer untuk keperluan perang.

Morrissey (1995:45) mendefinisikan strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa dan pasarnya dimasa depan dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari diperusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah”(Prof.Dr.M.Manullang,2012:17).

Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer mendefinisikan strategi sebagai 5p, yaitu: Strategi sebagai Perspektif, Strategi sebagai Posisi, Strategi sebagai Perencanaan, Strategi sebagai Pola, Strategi sebagai taktik, Strategi sebagai Posisi, dan strategi sebagai Perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Sedangkan menurut Steinberg dalam bukunya Sinaga sedikit berbeda dari pandangan Henry Mintzberg tentang definisi dari strategi, strategi diartikan sebagai rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya, sedangkan Lider Hart berpendapat bahwa ada beberapa esensi strategi, diantaranya:

1. Atur tujuan sesuai dengan maksud

2. Selalu tetapkan sasaran dalam pikiran
3. Pilih harapan yang paling mungkin
4. Berani melawan yang paling mungkin untuk dilawan
5. Ambil arah operasi yang menawarkan alternatif obyektif, dan
6. Pastikan bahwa antara rencana dan formasi strategi sifatnya fleksibel dan adaptif dengan waktu dan keadaan mendadak

Jauch (2014:19) mendefenisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi suatu organisasi atau suatu perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi yang telah penulis tuliskan diatas, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Dan kunci dari strategi juga merupakan seni dan tindakan bagaimana memenangkan persaingan. Untuk mencapai suatu keberhasilan tersebut, suatu organisasi harus mengembangkan kompetensi tertentu berupa kapabilitas inti, yang meliputi sumberdaya kongkrit (*intangible*) seperti sumberdaya fisik dan keuangan, dan sumberdaya non-fisik (*intangible*) seperti *reputasi*, keunggulan *teknologi*, *inovasi produk*, dan lain sebagainya. Sumberdaya tersebut ditransformasi menjadi *kapabilitas inti core capability*) yang unik sehingga memiliki daya cipta kompetensi untuk menjawab tantangan dan memiliki kemampuan bersaing.

2.2 Pengertian Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Menurut Rogers dan Storey Dalam bukunya Venus (2004), mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada jumlah besar khayalak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu

Dari pengertian kampanye diatas, sedikit berbeda dengan menurut Kotlar dan Roberto (1989), kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah peristiwa yang bisa didramatisasi (menegangkan). Oleh karena itu, Richard A. Josly dalam bukunya Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik. Dalam praktik, tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga berhasil karena dirancang dengan baik sesuai oleh seorang ahli yang berperan sebagai *spin doctor* (Hafied Cangara, 2014:229-230).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kampanye politik merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan (suara), usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan

keputusan didalam suatu kelompok organisasi. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, dimana seorang calon terpilih atau referenda diputuskan.

2.2.1. evaluasi Kampanye

- a. Efektivitas kampanye hanya bisa diketahui dengan evaluasi.

Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi program dan evaluasi manajemen:

1) Evaluasi Program

- a. Evaluasi program bisa disebut dengan evaluasi summatif (*summative evaluation*). Evaluasi ini memfokus untuk melihat:
 - b. Sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai(*goal*) dari suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak.
 - c. Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi

2) Evaluasi Manajemen

- a. Evaluasi Manajemen biasanya disebut evaluasi formatif (*formative evaluation*). Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan:

- 3) Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan semula.
- 4) Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak
- 5) Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak.
- 6) Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam operasional atau tidak

- 7) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah dengan cara memodifikasi langkah-langkah yang akan diambil, apakah mengurangi atau menambah komponen yang bisa memperlancar jalannya kegiatan.

2.3. Partai politik

2.3.1. Pengertian Partai Politik

Menurut *International Republican Institut*(IRI) dalam buku *Acuan Kampanye Manajemen Pemasaran* partai politik menyebutkan bahwa dalam masyarakat demokrasi, orang-orang yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama sering bergabung untuk membentuk partai. Ia melakukan itu guna memperkuat kemampuan dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Dalam membentuk partai biasanya mempromosikan seperangkat kepercayaan dan nilai yang dianut bersama (ideologi) kemudian mengembangkan pesan yang disampaikan pada pihak lain mengenai kepercayaan dan nilai kolektif mereka.

Dalam bukunya Hafied Cangara Partai Politik lahir pertama kali di Eropa Barat dari dua kekuatan, yakni dari parlemen dalam bentuk kelompok-kelompok elit yang didirikan untuk mempertahankan kedudukan raja, dan partai politik yang lahir di luar parlemen yang bersandar pada ideologi atau pandangan hidup tertentu, seperti sosialisme, kristen demokrat, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pasal 1, definisi Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan Undang-Undang No.31 tahun 2002, Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Menurut Muriam Budiarjo (2008) Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

2.3.2. Syarat Pembentukan, Tujuan, Fungsi, dan Kewajiban Partai Politik

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 pasal 2 dinyatakan bahwa syarat pembentukan Partai Politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi.
 - a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili oleh seluruh partai pendiri Partai Politik dengan akta notaris .
 - b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

2) 2.pendiri dan pembentuk Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
30% keterwakilan perempuan

3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan
ART serta pengurusan Partai Politik tingkat Pusat.

4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paaling sedikit
:

a. Asas dan ciri Partai Politik

b. Visi dan misi Partai Politik

c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik

d. Tujuan dan fungsi Partai Politik

e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan

f. Kepengurusan Partai Politik

g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan Politik

h. Sistem kaderisasi

i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik

j. Peraturan dan kepengurusan Partai Politik

k. Pendidikan politik,dan

l. Keuangan Partai Politik

m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

5. Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2
disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan

Partai Politik didirikan bukan tanpa tujuan, adapun tujuan Partai Politik
itu didirikan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Membangun etika dan budaya Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut (Ramlan Surbakti 2006:106), tujuan Partai Politik adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan kewajiban secara demokrasi berdasarkan UUD 1945.

Dalam bukunya Prof.Hafied Cangara di Indonesia, hak dan kewajiban Partai Politik telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, pasal 11, 12 dan 13 sebagai berikut:

3. Fungsi Partai Politik (pasal 12) diantaranya:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari beberapa poin yang telah penulis paparkan diatas tentang fungsi partai politik, sedikit berbeda menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Mustaqim politik lokal polarisasi kekuatan partai politik lokal (2014:49) diantaranya:

1. Sebagai sarana komunikasi politik.
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. sebagai sarana rekrutmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Managemen*)

4. Hak Partai Politik (pasal 12) diantaranya:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon bupati dan wakil Bupati, serta calon Walikota dan wakil Walikota, , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk dan memiliki Organisasi sayap Partai Politik
- j. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Partai (Politik pasal 13), diantaranya:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik
- f. mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
- g. melakukan pendaftaran memelihara ketertiban dan anggota.
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
- i. membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara berkala 1 sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

2.4. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen pelebagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Menghadapi kompetisi pemilu para politisi menghimpun diri dalam partai sebagai wadah mengorganisir nilai dan kepentingan yang hendak diperjuangkan, melalui eksplorasi nilai dan kepentingan, para politisi dan partai berusaha membangun pengaruh sekaligus membentuk kesolidaritasan guna mobilisasi dukungan rakyat dalam memenangkan pemilu.

Pemilu menjadi medium mengonversi kekuatan politik masyarakat sipil (partai politik) ke dalam suprastruktur pemerintahan negara. Sebagaimana medium mengonversi kekuatan politik masyarakat sipil. Pemilu sekaligus berfungsi mentransformasi format keterwakilan rakyat dalam pemerintah. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang sistem pemilu dan berbagai perangkat ketentuan pemilu lainnya, tidak jarang menjadi perdebatan dalam usaha menerjemahkan demokrasi perwakilan.

Dalam bukunya Firdaus (2015:401) yang berjudul Pemerintahan Demokrasi dan sistem kepartaian ada dua arus perdebatan konsep perwakilan yang senantiasa menjadi landasan dalam penentuan sistem pemilu, dan secara tidak langsung berimplikasi terhadap pelebagaan sistem kepartaian. Diantara konsep tersebut adalah yang pertama konsep perwakilan proporsional (*Proportional representation*) dan yang kedua konsep perwakilan distrik (*district representation*).

2.4.1. Konsep sistem pemilu proporsional

Dimana distribusi kursi diantara partai politik peserta pemilu dibagi berdasarkan proporsi perolehan suara secara nasional menurut jumlah bilangan pembagi tertentu. Proporsi perolehan suara partai secara nasional, sebagai dasar pembagian kursi dalam lembaga perwakilan rakyat, memperkecil terbuangnya sisa suara serta memperbesar peluang keterwakilan rakyat, hingga pada partai-partai politik terkecil. Tidak salah jika kalkulasi peluang yang diciptakan oleh sistem pemilu proporsional menjadi pemicu perpecahan partai atau terbentuknya partai-partai baru. Oleh sebab itu, sistem pemilu proporsional cenderung memperbesar jumlah partai efektif yang berdampak pada terbentuknya sistem multipartai.

2.4.2 Konsep sistem pemilu distrik

Salah satu sistem pemilu yang dalam banyak segi cenderung mengendalikan jumlah partai efektif. Hal tersebut terjadi karena suatu negara dibagi dalam beberapa distrik yang mana pembagian kursi, didasarkan pada satu distrik, dimana satu orang wakil dengan mekanisme suara terbanyak (*plurality system*) atau *the first past the post*. Artinya, pemenangan suara terbanyak pertama mewakili distriknya. Sedangkan calon pemenang kedua dan seterusnya terbuang begitu saja tanpa dapat diperhitungkan dan dijadikan bilangan pembagi dalam perolehan kursi. Akibatnya, sistem pemilu distrik dapat menimbulkan disproportionalitas yang tinggi. Tetapi pada sisi lainnya memaksa partai-partai melakukan fusi untuk memenangkan satu distrik pemilihan. Oleh sebab itu terpilihnya satu wakil membentuk emosional yang kuat dengan konstituen daerah pemilihan

2.5. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan pemimpin di daerah pun tetap dilaksanakan secara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada

telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

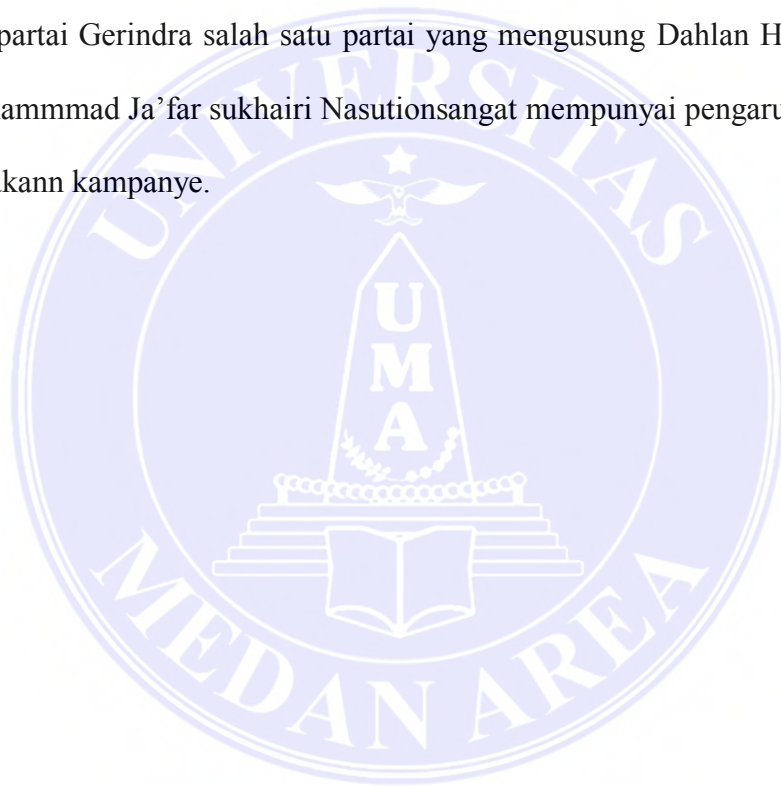
1. Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintan daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tentang PERPU Nomor 3 tahun 2005.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa *recruitment* kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak

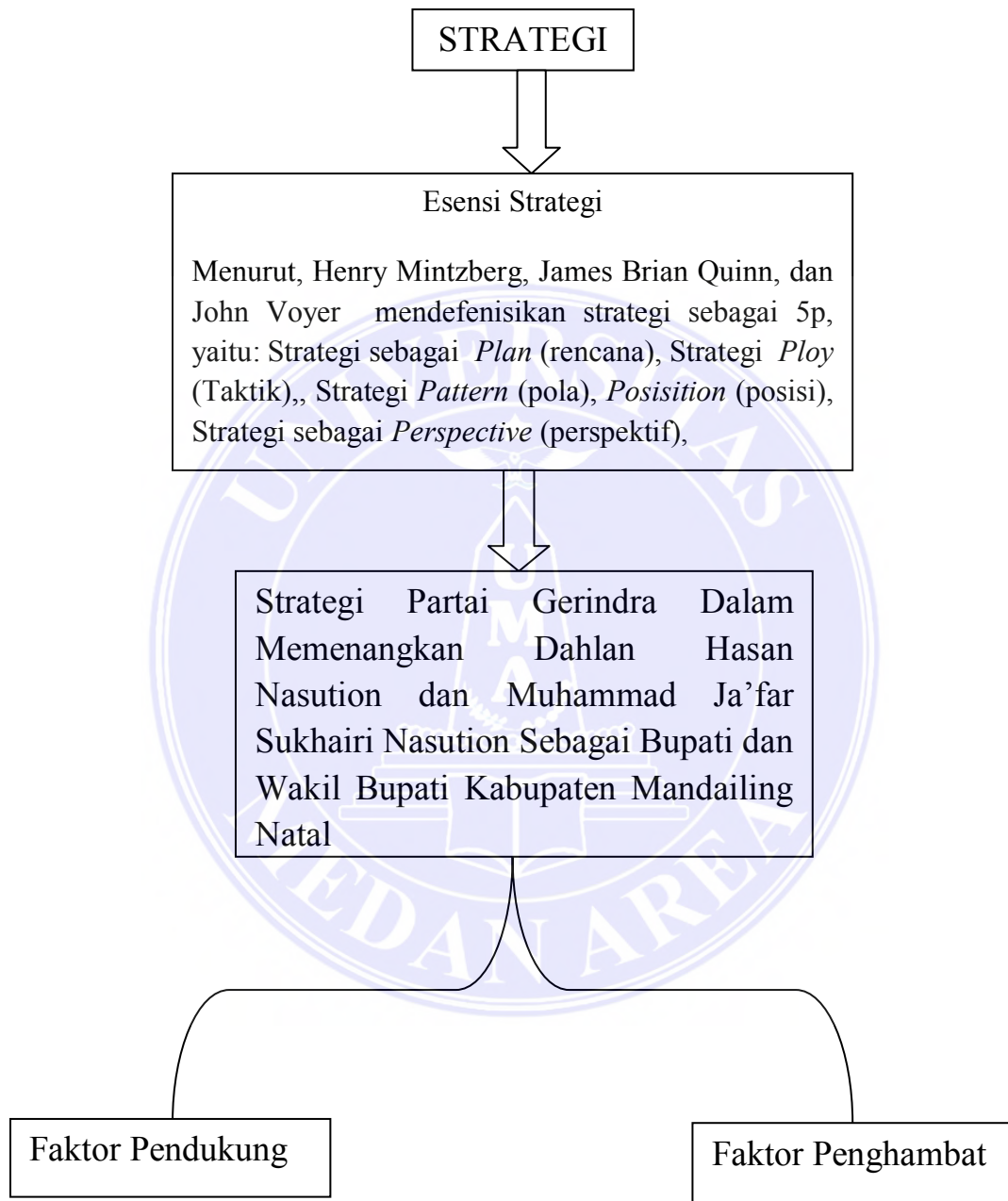
Menurut Rahmat hollyson MZ dan Sri sundari (2015:20) pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan pemimpin di daerah pun tetap dilaksanakan secara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, hal ini setara dengan yang diungkapkan

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep untuk melakukan penelitian, dengan adanya kerangka pemikiran maka hasil penelitian yang dilakukan dilapangan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Dalam menyusun strategi untuk memenangkan Dahlan Hasan Nasution & Muhammad Ja'far sukhairi Nasution sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten mandailing Natal, partai Gerindra salah satu partai yang mengusung Dahlan Hasan Nasution & Muhammad Ja'far sukhairi Nasutionsangat mempunyai pengaruh besar dalam melakukann kampanye.



Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis secara sistematis.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut Silalahi, (2009:12) Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha

untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPC Partai Gerindra Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Merdeka No.185, Panggorengan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatra Utara.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam proposal Skripsi ni, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Desember 2017				Januari 2017				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Seminar Proposal																								
3	perbaikan proposal																								
4	Penelitian																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Seminar Hasil																								
7	Perbaikan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

Sumber : dikelola oleh penulis

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten Mandailing Natal.
2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu Konsultan Politik dalam pemenangan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi
3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu Tim sukses dalam pemenangan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017: 137) Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik kondisi alamiah, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data *primer* berdasarkan tekniknya dilakukan melalui, Wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu Sugiyono (2017:139)

b. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan, Susunan kata-kataa dalam setiap pertanyaan dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu seingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpuln data. Penelitian ini tidak diutamakan besarnya jumlah informan. Jika data yaang sudah terkumpul sudah mendalam dan

bisa menjelaskan fenomena yang teliti, maka tidak perlu lagi mencari informan lainnya.

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode yang peneliti pakai adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif itu sendiri terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersama-sama:

1. Reduksi data,

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian lapangan. Melalui kegiatan ini, maka penelitian dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 249) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan *text* yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah akhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kesimpulan catatan dilapangan.





BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

5.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan. Berdasarkan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Dpc partai Gerinda Mandailing Natal melakukan strategi kampanye untuk memenangkan pasangan Dahlah Hasan Nasution & Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, serta akademisi untuk memperkuat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh partai Gerindra dan tim sukses.
2. melakukan kampanye dalam bentuk tim/kerjasama antara pengurus partai dengan tim sukses, dimana tim yang dibentuk itu adalah mereka orang-orang yang memiliki loyalisnya terhadap partai, utamanya mereka yang termasuk dalam organisasi sayap partai gerindra.
3. Melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, contoh komunikasi yang dilakukan partai Gerindra seperti ketika ada kemalangan kader partai menyempatkan hadir untuk berbela sengkawa sekaligus demi mendapatkan simpati dari masyarakat, serta keramaian-keramaian masyarakat lainnya^{****}.

4. Melakukan kampanye sesuai dengan kebudayaan di setiap masyarakat.
Dengan tujuan supaya masyarakat lebih tertarik dan tidak bosan akan hadirnya suatu calon di tengah-tengah masyarakat.

5.1.2. Saran

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan ketika dilapangan terhususnya di kantor Dpc Gerindra Mandailing Natal dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah berhasil untuk meyakinkan masyarakat maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penulis menyarankan kepada Dpc Partai Gerindra Mandailing Natal untuk tetap melakukan pendekatan-pendekatan serta melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat meskipun diluar dari masa kampanye politik, karna masyarakat pada umumnya tidak mengharapkan hadirnya seorang pemimpin daerah ditengah-tengah mereka bukan hanya waktu kampanye saja.
- 2) Penulis menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang telah berhasil memenangkan Pilkada pada tahun 2015 untuk selalu mementingkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan tim, karna pada dasarnya masyarakat telah memberikan kepercayaannya terhadap beliau selama satu periode pemerintahan daerah.
- 3) Juga diharapkan kepada paslon yang telah memenangkan Pilkada pada tahun 2015 agar menjalankan semaksimal mungkin program-program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada masa kampanye, karna masyarakat selalu menunggu akan janji-janji politik pasangan calon yang telah memenangkan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmadi dan Narkubo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aziz, Yaya Mulyana. Hidayat, Syarief. 2016. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Faules F, Don, dan Pace Wayne R. 2015. *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan*
- Firdaus. 2015. *Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya
- Heryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberti
- Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Manullang, M. 2012. *Manajemen Strategi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Mustaqim, 2014. *Politik Lokal Polarisasi Partai Politik Lokal Di Kabupaten Eceh Timut*. Medan: LKISPOL-PRESS
- Mz Hollyson, Rahmad dan Sundari Sari. 2015. *Pilkada*. Jakarta: Pilkada Serentak
- Rudianto Dodi dan Hs Kirbiantoro, 2008. *Acuan Kampanye Manajemen Pemasaran Partai Politik*. Jakarta:
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sinaga, Rudi Salam. 2011. *Pemasaran Politik Teori dan Aplikasi Pemasaran Politik dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008*. Medan: Fisip USU Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Nomor. 2 Tahun 2006 Tentang Partai Politik

Nomor. 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik

Nomor. 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Nomor. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tentang PERPU Nomor 3 tahun 2005

Sumber Situs Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya. (diakses pada tanggal 08 juli 2018)

<http://kpud-madinakab.go.id/>. (diakses pada tanggal 10 juli 2018)



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DPC PARTAI GERINDRA MANDAILING NATAL

1. Pada tahun berapa Dpc partai Gerindra Mandailing Natal pertama kali dibentuk.?
2. Apa fungsi, kewenangan, dan kewajiban Dpc partai Gerindra Mandailing Natal.?
3. Apakah Dpc partai Gerindra Mandailing Natal sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban partai politik.?
4. Apa Visi dan Misi Dpc partai Gerindra Mandailing Natal.?
5. Upaya apa saja yang dilakukan pengurus Dpc partai Gerindra Mandailing Natal dalam memenangkan dahlan Hasan Nasution & Muhammad Ja'kfar Sukhairi dalam Pemilihan kepala Daerah Mandailing Natal pada tahun 2015.?
6. Bagaimana kerjasama antara pengurus Dpc partai Gerindra Mandailing Natal dengan konsultan politik dahlan Hasan Nasution & Muhammad Ja'kfar Sukhairi serta tim kampanye kemenangannya.?
7. Jika dilihat dari suku dan marga kedua calon merupakan marga yang sama, apakah hal seperti berpengaruh dalam kemenangan pasangan calon.?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KONSULTAN SERTA TIM KAMPANYE
KEMENANGAN DAHLAN HASAN NASUTION & MUHAMMAD JA'KFAR
SUKHAIRI NASUTION DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MANDAILING NATAL
TAHUN 2015

1. Apa saja langkah-langkah strategi yang diambil dalam melakukan kampanye.?
2. Bagaimana partisipasi partai pengusung dalam melakukan kampanye.?
3. Seberapa besar pengaruh partai pengusung dalam kemenangan pasangan dahlhan hasan nasution & muhammad ja'kfar sukhairi Nasution.?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam melaksanakan kampanye untuk meyakinkan Masyarakat.?
5. Seperti apa pola kampanye yang dilakukan, apakah setiap daerah itu sama atau tergantung daerah yang di datangi.?
6. Apa saja kendala-kendala pada saat melakukan kampanye.?

Lampiran 2

DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN

Gambar 1



Hal: Foto bersama dengan ketua Dpc Gerindra Mandailing Natal Bapak Erwin Efendi Lubis

Gambar 2



Hal: Foto bersama dengan salah seorang tim sukses pemenangan Dahlan Hasan Nasution dan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution pada pibub Mandailing Natal tahun 2015

Gambar 3



Hal: Foto bersama dengan timsukses dan juga pengurus Dpc Gerindra Mandailing Natal



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SURAT KETERANGAN

Nomor : ST-29/07-063 /B/DPC-GERINDRA/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN EFENDI LUBIS, SH
Jabatan : Ketua DPC Partai GERINDRA Kab. Mandailing Natal
Alamat : Jl. Merdeka No. 185 Desa Panggorengan
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : MUHAMMAD SUKRI
NPM : 148510009
Fakultas : Isipol
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Medan Area

Telah selesai melakukan penelitian di DPC Partai GERINDRA Kab. Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Merdeka No. 185 Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul 'STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION DAN H. M. JA'FAR SUKHAIRI NASUTION SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL'

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Panyabungan, 03 Juli 2018

Ketua DPC Partai GERINDRA
Kab. Mandailing Natal


ERWIN EFENDI LUBIS

Jl. Merdeka No. 185 Panggorengan - Panyabungan - Mandailing Natal - Sumatera Utara
dpc.partai.gerindra.madina@gmail.com, facebook.com/dpc.gerindra.madina



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7356878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 387/FIS.1/01.10/V/2018
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

25 Mei 2018

Yth,
Ketua DPC Gerindra Mandaling Natal
Jl. Merdeka No. 185 Penggorengan Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Muhammad Sukri
N P M : 148510009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke DPC Gerindra Mandaling Natal, dengan judul Skripsi **"Strategi Partai Gerindra Dalam Memenangkan Dahlan Hasan Dan Ja'far Sukhairi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC : File,-